

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI  
PENYERAPAN BELANJA PADA KEGIATAN  
PEMBETONAN JALAN (BETONISASI) DI DESA  
PATOMAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN  
PRINGSEWU LAMPUNG TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan**

**dalam menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Dinda Husnul Khotimah**

**NIM. 07011181621001**

**Konsentrasi Keuangan Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**JUNI 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI  
PENYERAPAN BELANJA PADA KEGIATAN  
PEMBETONAN JALAN (BETONISASI) DI DESA  
PATOMAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN  
PRINGSEWU LAMPUNG TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana-S1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**DINDA HUSNUL KHOTIMAH  
07011181621001**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2022**

**Pembimbing I**

**Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001**



**Pembimbing II**

**Sofyan Effendi, S.IP, M.Si  
NIP. 197705122003121003**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PENYERAPAN  
BELANJA PADA KEGIATAN PEMBETONAN JALAN (BETONISASI)  
DI DESA PATOMAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN  
PRINGSEWU LAMPUNG TAHUN 2019**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Dinda Husnul Khotimah**

**07011181621001**

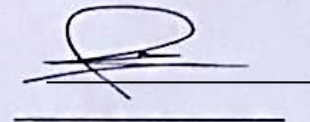
**Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 31 Mei 2022**

**Pembimbing :**

1. Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001



2. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si  
NIP. 197705122003121003

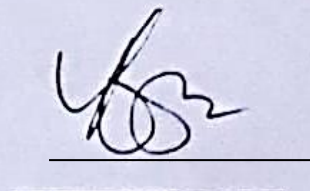


**Penguji :**

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



2. Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A  
NIP. 196201051988032004



**Mengetahui,**

**Dekan FISIP UNSRI**

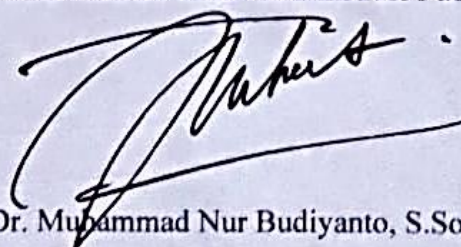
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Prof. Dr. Alfritri, M.Si**

**NIP. 196601221990031004**

**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 196901101994011001**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Husnul Khotimah  
NIM : 07011181621001  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pringsewu, 24 Juni 1999  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan  
Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan  
(Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 1 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Dinda Husnul Khotimah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Ketika dalam kesulitanmu orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena  
ALLAH sendirilah yang akan mengurusmu”**

**(Imam Syafi’i)**

**“Apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalannya sendiri untuk  
menemukanmu”**

**(Ali Bin Abi Thalib)**

**Dengan Rahmat Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Kedua orang tuaku yang aku cintai, Bapak Suseno S.Pd dan Ibu Cik Dop**
- 2. Kakak kandungku Tika Yuli Lestasi, Novi Oktaliana Sari, dan Destia Mufkholifah**
- 3. Adikku Dimas Yoguswara, Iffat Najwan, dan Hasna Sharima**
- 4. Sahabatku Triana Agustin, Arsita Dewi Putri, Firsti Astari, dan Nurma Pertiwi**
- 5. Seluruh dosen dan staf akademik FISIP UNSRI**
- 6. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Ilmu Adminitrasi Publik angkatan 2016**
- 7. Almamater kebanggaanku**

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019. Masalah yang ditemui yaitu pembahasan saat musyawarah desa yang belum sesuai, penyebaran informasi anggaran belum *up to date*, permasalahan pada laporan pertanggungjawaban, penggalian gagasan yang belum efektif, dan kurangnya media informasi. Teori yang digunakan adalah teori penerapan prinsip transparansi penyerapan belanja menurut Coryanata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dilihat dari aspek pengumuman kebijakan anggaran yaitu terdapat pengumuman pencairan anggaran berupa *banner* APB-Desa, namun informasi bersifat umum serta pengumuman dilakukan secara lisan. Aspek dokumen anggaran yang mudah diakses yaitu terdapat permohonan pencairan serta dokumen finalisasi produk yang termuat dalam SPJ. Aspek laporan pertanggungjawaban yaitu terdapat SPP dan LPJ, walaupun tidak secara spesifik Aspek akomodasi suara atau usulan rakyat yaitu terdapat penyerapan aspirasi masyarakat melalui wadah musrembang dan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan di lapangan. Aspek sistem pemberian informasi kepada publik yaitu terdapat media cetak berupa *banner* APB-Desa, penyebarluasan informasi dari mulut ke mulut dan perkembangan penyebarluasan informasi melalui grup publik pada aplikasi *whatsapp*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi penyerapan belanja (betonisasi) di Desa Patoman sebagian besar telah terealisasi, namun masih terdapat beberapa sub aspek yang belum baik atau kurang maksimal. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Patoman berupa pembuatan *website* desa dan peningkatan dokumen transparansi anggaran perkegiatan, serta peningkatan akomodasi usulan rakyat.

**Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Transparansi, Penyerapan, Belanja, Betonisasi**

**Pembimbing I**



**Dr. Lili Erina, M.Si**  
NIP.196612301992032001

**Pembimbing II**



**Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si**  
NIP.197705122003121003

**Indralaya, Juni 2022**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196901101994011001

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the principles of transparency of absorption of expenditure in road concrete activities (concrete) in Patoman Village, Pagelaran District, Pringsewu Regency, Lampung in 2019. The problems encountered were discussions during village deliberations that were not appropriate, the dissemination of budget information was not up to date, problems in accountability reports, ineffective idea exploration, and lack of information media. The theory used is the theory of applying the principle of transparency in spending absorption according to Coryanata. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The results of the study were seen from the aspect of budget policy announcements, namely there were announcements of budget disbursement in the form of APB-Village banners, but the information was general in nature and the announcements were made orally. Aspects of budget documents that are easily accessible include requests for disbursement as well as product finalization documents contained in the SPJ. Aspects of accountability reports, namely there are SPP and LPJ, although not specifically Aspects of accommodation of voices or people's proposals, namely there is absorption of community aspirations through musrembang forums and community participation as implementers of development in the field. The system aspect of providing information to the public is that there is print media in the form of APB-Village banners, dissemination of information by word of mouth and the development of information dissemination through public groups on the whatsapp application. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the principles of transparency in spending absorption (concrete) in Patoman Village had mostly been realized, but there were still some sub-aspects that were not good or not optimal. Efforts that must be made by the Patoman Village Government are in the form of making village websites and increasing activity budget transparency documents, as well as increasing people's proposals for accommodation.

**Keywords:** *Application, Principle, Transparency, Absorption, Shopping, Concreteization*  
Advisor I Advisor II



**Dr. Lili Erina, M.Si**  
NIP.196612301992032001



**Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si**  
NIP.197705122003121003

**Indralaya, June 2022**  
**Head of Department of Public Administration,**  
**Faculty of Social and Political Sciences,**  
**Sriwijaya University**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196901101994011001

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019.”**

Penyusunan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan menjadi sempurna tanpa adanya dukungan, doa, dan kerja keras dari berbagai pihak yang merestui, terutama Kedua orang tua serta ketiga kakak perempuanku. Oleh karena itu, selama pembuatan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan motivasi serta pengarahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan diwujudkan sesuai dengan rencana. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Lili Erna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya dalam penyelesaian proposal penelitian ini.
5. Bapak Sofyan Effendy S.IP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing dan menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Dr. Nengyanti M.Hum selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan secara akademik maupun non-akademik sejak saya menjadi mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya hingga saya menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Seluruh dosen staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya.
8. Staf Pemerintah Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian, serta memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengolah data yang telah diberikan untuk diolah menjadi skripsi yang bermanfaat bagi pembaca.
9. Seluruh rekan dan sahabat mahasiswa/i Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.



Demikian skripsi ini penulis susun dengan sebenar-benarnya, secara maksimal, bersungguh-sungguh berdasarkan sumber-sumber yang mengikuti ketentuan penulisan skripsi antara lain buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan web yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun, tentunya penulis juga masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, serta bisa dijadikan sumber data untuk pembahasan tugas lain maupun dijadikan referensi penyusunan skripsi lainnya, serta dapat membantu menguraikan dan menghasilkan solusi dari kendala administrasi yang ada.

Indralaya, Juni 2022  
Penulis,

Dinda Husnul Khotimah

# DAFTAR ISI

## COVER

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN dan LAMBANG .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis.....	13

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	14
B. Keuangan Negara .....	14
1. Pengertian Keuangan Negara .....	14
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	16
C. Anggaran ( <i>Budgeting</i> ) .....	17
1. Pengertian Anggaran .....	17
2. Siklus Anggaran .....	19
D. Penyerapan Anggaran.....	23
1. Pengertian Penyerapan Anggaran.....	23
2. Proses Penyerapan Anggaran .....	24
E. <i>Good Governance</i> .....	25
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	25
2. Karakteristik <i>Good Governance</i> Menurut UNDP .....	26
F. Aspek Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
G. Transparansi.....	28
1. Pengertian Transparansi .....	28
2. Indikator Transparansi.....	29
3. Transparansi Penyerapan Belanja menurut Coryanata.....	29
H. Penelitian Terdahulu.....	36
I. Kerangka Pemikiran .....	38

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Definisi Konsep.....	39

C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
1. Jenis Data.....	42
2. Sumber Data .....	42
E. Informan Penelitian .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Observasi/Pengamatan.....	43
2. Wawancara Mendalam ( <i>in depth interview</i> ).....	44
3. Dokumentasi.....	44
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Sistematika Penulisan .....	47

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Patoman .....	49
1. Sejarah Singkat Desa Patoman .....	49
2. Visi dan Misi Desa Patoman .....	52
3. Struktural Organisasi Pemerintah Desa Patoman .....	53
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Patoman.....	54
B. Hasil dan Pembahasan .....	58
1. Analisis Pengumuman Kebijakan Anggaran .....	59
a. Ketersediaan Pengumuman Pencairan Anggaran Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi).....	59
b. Ketersediaan Pengumuman Realisasi Pendapatan Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi).....	64
c. Ketersediaan Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) .....	70
2. Analisis Dokumen Anggaran yang Mudah di Akses.....	74
a. Ketersediaan Dokumen Prosedur Pencairan.....	75
b. Ketersediaan Dokumen Target Unit dan Alokasi Sumber Daya.....	78
c. Ketersediaan Dokumen Finalisasi Produk.....	85
3. Analisis Laporan Pertanggungjawaban .....	89
a. Ketersediaan Laporan Penyelesaian Pencatatan Barang, Modal, dan Aktivitas Jasa .....	90
b. Kelengkapan Laporan Rekapitulasi Realisasi Pendapatan.....	96
c. Ketersediaan Laporan Finalisasi Kegiatan .....	100
4. Analisis Akomodasi Suara atau Usulan Rakyat .....	105
a. Keterlibatan Rakyat pada Proses Pembuatan Prosedur dan Anggaran Kas .....	106
b. Akomodasi Suara Rakyat untuk Menghitung Potensi dan Pengenaan Sanksi serta Intensif.....	112
c. Keikutsertaan Rakyat pada Pelaksanaan Program.....	118
5. Analisis Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik.....	124
a. Ketersediaan Media Penyampaian Informasi Pencairan Anggaran.....	125
b. Penyebarluasan Informasi Realisasi Pendapatan.....	131
c. Teknik Pemberian Informasi Pelaksanaan .....	134

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
1. Saran Teoritis.....	146
2. Saran Praktis .....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
-----------------------------	------------

<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>152</b>
--------------------------------	------------

<b>PEDOMAN OBESERVASI.....</b>	<b>153</b>
--------------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. APBDesa Desa Patoman Tahun Anggaran 2019 .....	10
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Pementan Jalan (Betonisasi) Desa Patoman Tahun Anggaran 2019.....	11
3. <i>Review</i> Penelitian Terdahulu .....	37
4. Fokus Penelitian .....	41
5. Daftar Nama Kepala Desa Patoman .....	51
6. Anggaran Realisasi Pendapatan Kegiatan Pementan Jalan (Betonisasi) Desa Patoman Tahun 2019 .....	67
7. Alokasi Sumber Daya Pelaksanaan Kegiatan Pementan Jalan (Betonisasi) ..	82
8. Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Patoman Tahun Anggaran 2019 .....	98
9. Tahapan dan Distribusi Dana Kegiatan Pementan Jalan (Betonisasi).....	101
10. Rekap Data Tukang dan Pekerja Kegiatan Pementan Jalan (Betonisasi) Desa Patoman Tahun 2019 .....	121
11. Matriks Hasil Pembahasan Penelitian .....	140

## DAFTAR GAMBAR

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Patoman Tahun Anggaran 2019.....	7
2. Penyebaran Informasi Penyerapan Anggaran Desa Patoman Terbaru.....	8
3. Daftar Peserta Musyawarah Desa Patoman Tahun 2019.....	9
4. Contoh Transparansi Penyerapan Belanja Bidang Pembangunan Fisik Desa Tritunggal Mulya Kabupaten Pringsewu.....	9
5. Kerangka Pemikiran.....	38
6. Gedung Kantor Desa Patoman.....	51
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Patoman.....	54
8. <i>Banner</i> Rancangan APBD Desa Patoman Tahun 2019.....	62
9. Dokumen Prosedur Pencairan Desa Patoman Tahun 2019.....	77
10. Dokumen Target Unit Kegiatan Pembangunan Desa Patoman Tahun Anggaran 2019.....	81
11. Dokumen LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).....	87
12. Hasil Observasi Finalisasi Produk Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi).....	87
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Patoman.....	94
14. Hasil Observasi Finalisasi Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) di Dusun I Desa Patoman.....	102
15. Hasil Observasi Finalisasi Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) di Dusun II Desa Patoman.....	102
16. Hasil Observasi Finalisasi Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) di Dusun III Desa Patoman.....	103
17. Hasil Dokumentasi Keterlibatan Rakyat dalam Proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang).....	110
18. Hasil Dokumentasi Akomodasi Suara Rakyat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang).....	115
19. Hasil Dokumentasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Desa Patoman Tahun 2019.....	116
20. Hasil Observasi Pencarian <i>Website</i> Pemerintah Desa Patoman.....	127
21. Hasil Observasi Pencarian Grup Publik di Aplikasi <i>Facebook</i> Pemerintah Desa Patoman.....	129
22. Hasil Observasi Perkembangan Penyebarluasan Informasi Desa Patoman.....	133
23. Hasil Dokumentasi Contoh Teknik Pemberian Informasi Pelaksanaan Berupa Papan Informasi di Desa Bumi Ratu.....	136
24. Hasil Observasi <i>Website</i> Pemerintah Desa Bumi Ratu.....	138

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Permohonan Surat Izin Penelitian Skripsi
2. Surat Tugas
3. Permohonan Izin Penelitian Kesbangpol Palembang
4. Permohonan Izin Penelitian Kepala Pekon Desa Patoman
5. Rekomendasi Penelitian/Survei Kesbangpol Palembang
6. Surat Pengantar Kesbangpol Palembang
7. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing I
8. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing II
9. Konfirmasi Kesiediaan Menjadi Pembahas Seminar Proposal Skripsi Dosen Pembimbing I
10. Konfirmasi Kesiediaan Menjadi Pembahas Seminar Proposal Skripsi Dosen Pembimbing II
11. Daftar Hadir Seminar Proposal
12. Lembar Revisi Seminar Proposal
13. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
14. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
15. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
16. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 40 ayat 1)
17. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15
18. RKP Desa Patoman Tahun Anggaran 2019
19. SPJ Desa Patoman
20. Permohonan Pencairan
21. Kegiatan Wawancara dan Dokumentasi
22. Data Keuangan Desa Patoman Tahun Anggaran 2019
23. Lembar Revisi Ujian Komprehensif

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

ADP	: Anggaran Dana Pekon
APBDDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BHP	: Badan Himpun Pemekonan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUN	: Bendahara Umum Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DD	: Dana Desa
DIK	: Daftar Isian Kegiatan
DIP	: Daftar Isian Proyek
GASB	: <i>Governmental Accounting Standartds Board</i>
Jling-S	: Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan desa
Kadus	: Kepala Dusun
Kasi	: Kepala Seksi
K/L	: Kementerian atau Lembaga
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
Musrembang	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
NCGA	: <i>National Committee on Gpvernmental Accounting</i>
PUSDIKLAT	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
SDM	: Sumber Daya Manusia
Betonisasi	: Pembedonan Jalan
SKO	: Surat Keputusan Otorisasi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPTB	: Surat Pertanggung Jawaban Belanja
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UNDP	: <i>United National Development Programme</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Fuad, 2017:13). Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari pelaksanaan *good governance*, sebagaimana telah dijelaskan oleh *United National Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2018:32) bahwa “terdapat 9 (sembilan) karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi : *Participation, Rules of law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, and Strategic Vision.*”

*Good governance* sendiri sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, sedangkan menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2018:32) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *good governance* adalah :

“Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

*Council of Europe* (2008) dalam Mardiasmo (2018:33) mendefinisikan *good governance* sebagai “perilaku dalam hal urusan publik dan manajemen sumber daya publik yang bertanggungjawab.” *Council of Europe* merumuskan 12 (dua belas) prinsip pemerintahan yang baik yaitu : 1) Perilaku pemilihan umum, representasi, dan partisipasi yang adil, 2) Responsif, 3) Efisiensi dan efektivitas, 4) Keterbukaan dan transparansi, 5) Peraturan Perundang-undangan, 6) Etika perilaku, 7) Kompetensi dan kapasitas, 8) Inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan, 9) Keberlanjutan dan orientasi jangka panjang,

10) Pengelolaan keuangan yang sehat, 11) Hak asasi manusia, keanekaragaman budaya, dan kohesi sosial, 12) Akuntabilitas.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Namun, transparansi tidak diartikan sebagai keseluruhan informasi harus disebarluaskan kepada publik. Maksudnya adalah dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebih dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilih mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini tentunya perlu dilakukan oleh pemerintah, tujuannya guna menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik.

Pelaksanaan transparansi itu sendiri memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat apakah proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai atau belum sesuai. Menurut Kristiante (2006) dalam skripsi Fatmasary (2017:24) mengatakan bahwa transparansi itu dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Penyerapan sendiri dapat diartikan sebagai pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja.

Belanja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja Desa dalam penelitian ini berfokus pada bidang pembangunan fisik yang berupa pembangunan pembeconan jalan (betonisasi).

Betonisasi dalam KBBI adalah pembeconan jalan, istilah lain dari betonisasi adalah rabat beton, sedangkan dalam pembangunan desa dikenal dengan istilah pengerasan jalan yang mana persamaan istilah ini telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan yang menjelaskan bahwa jalan lingkungan primer yang selanjutnya disebut Jling-S adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan desa, dengan salah satu bentuk pembangunan jalan berupa rabat beton. Ditulis dalam [www.asiacon.co.id](http://www.asiacon.co.id) (2019:1) rabat beton adalah lapisan beton berkualitas rendah yang dibendung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan, dengan campuran konsentrat dan semen dalam pembuatannya sehingga kualitasnya lebih rendah, oleh karena itu disama artikan dengan rabat beton.

Anggaran Negara Republik Indonesia terdiri atas dua unsur penting, yaitu anggaran pengeluaran atau disebut anggaran belanja Negara dan anggaran pendapatan Negara (Anggara, 2016:167). Sedangkan APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Klasifikasi belanja desa telah dicantumkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa salah satunya yaitu dibidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Belanja desa dalam bidang pembangunan menggunakan sumber dana dari pendapatan transfer Dana Desa. Oleh karena itu jika membahas tentang anggaran maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pintar Dana Desa, bahwa yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada pembangunan fisik berupa pembetonan jalan (betonisasi) di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung dengan sumber dana berasal dari Dana Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patoman yang didanai dari Dana Desa antara lain pembangunan talud, pembetonan jalan, pembangunan drainase, peningkatan prasarana jalan desa, pembangunan gorong-gorong, dan pembangunan jalan baru.

Transparansi penyerapan belanja secara harfiah terdiri atas dua kata yaitu transparansi dan penyerapan belanja. Menurut Chalid (2005) dalam Ritonga dan Syamsul (2006:112) menjelaskan bahwa “transparansi dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.” Sedangkan menurut Malahayati (2015) dalam Fajar dan Arfan (2017:96) “penyerapan belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.” Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transparansi penyerapan belanja merupakan keterbukaan informasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan keuangan, dimana informasi tersebut memperlihatkan bagaimana pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan selalu memperhatikan asas keterbukaan pada publik.

Transparansi penyerapan belanja dapat diukur dengan beberapa indikator yang akan menjadi standar untuk memperlihatkan apakah pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan telah memperlihatkan adanya transparansi penyerapan belanja yang ideal atau tidak ideal. Menurut Coryanata (2007) dalam Auditya dkk (2013:27) “Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan dan lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”. Oleh karena itu, kriteria anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan transparan apabila telah memenuhi kriteria berikut :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

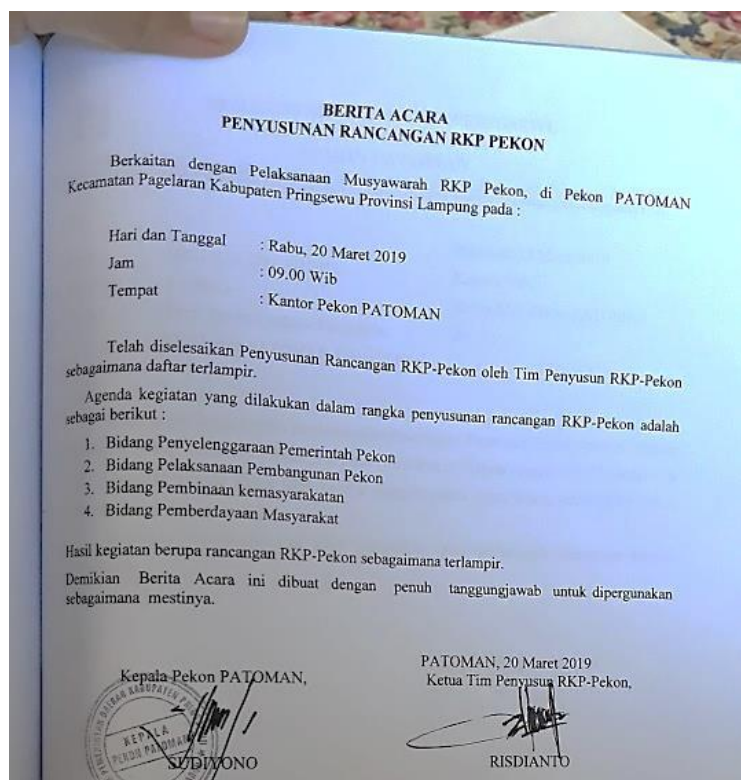
Transparansi penyerapan belanja yang ideal, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan fisik yang sumber dananya berasal dari Dana Desa sebagaimana telah disebutkan diatas, dipertegas oleh pemerintah Indonesia dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan antara lain sebagai berikut :

- a. Kriteria terdapat pengumuman kebijakan anggaran, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi : “Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada masyarakat umum dan melaporkannya dalam Musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.”

- b. Kriteria tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi : “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.”
- c. Kriteria tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf d yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada akhir tahun anggaran.”
- d. Kriteria terakomodasinya suara atau usulan rakyat, diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15 yang berbunyi : “Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.”
- e. Kriteria terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (3) dan (4) yang berbunyi : “Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta SDM.” dan “Sistem informasi desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.” Serta dipertegas dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.”

Berdasarkan hasil penelaahan secara langsung serta penelaahan melalui situs website dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui media sosial, ditemukan adanya beberapa permasalahan yang tidak memperlihatkan adanya pelaksanaan dari peraturan diatas. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Musyawarah desa yang dilakukan di Desa Patoman hanya membahas tentang RKPDesa Patoman tahun anggaran 2019, yang mana seharusnya pemerintah Desa Patoman menginformasikan tidak hanya mengenai RKPDesa namun juga menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, dan APBDDesa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa patoman belum melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 ayat (4) berikut bukti pelaksanaan musyawarah desa patoman :



**Gambar 1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Patoman Tahun Anggaran 2019**  
*Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Patoman Tahun Anggaran 2019*

- b. Dokumen penyerapan anggaran yang diinformasikan kepada masyarakat Desa Patoman tidak diumumkan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1), yang mana seharusnya pemerintah Desa Patoman menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, berikut buktinya :

Home .berita terkini Pringsewu

## Pembangunan Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran 2018

0 radar nusantara Selasa, 23 April 2019

**PENDAPATAN DESA**  
**Rp. 1.259.461.620.-**  
 - DANA DESA : Rp. 743.352.000  
 - ALOKASI DANA DESA : Rp. 499.416.000  
 - BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH : Rp. 10.693.620  
 - BANTUAN KABUPATEN : Rp. 6.000.000

**BELANJA DESA**  
**Rp. 1.259.461.620.-**  
 - BIDANG PEMERINTAHAN : Rp. 483.196.000  
 - BIDANG PEMBANGUNAN : Rp. 671.807.000  
 - BIDANG PEMBIAYAAN : Rp. 16.320.000  
 - BIDANG PEMBEBDAYAAN : Rp. 88.138.620

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
 - PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH  
 - PEMBANGUNAN RABAT BETON  
 - PEMBANGUNAN DRAINASE  
 - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFORMASI PEKON (JARINGAN INTERNET)

**BIDANG PEMBEBDAYAAN**  
 - PENINGKATAN KAPASITAS KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
 - PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 - PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 - PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK BINA KELUARGA

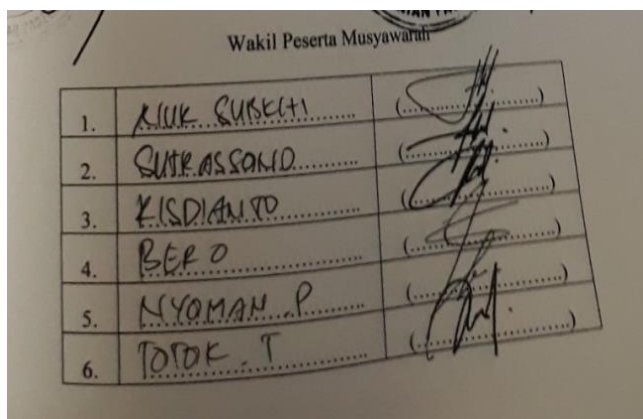
**Gambar 2. Penyebaran Informasi Penyerapan Anggaran Desa Patoman Terbaru**

*Sumber : www.radarnusantara.com*

- c. Pemberian dan penyebaran informasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa Patoman sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat Desa Patoman belum terlaksana sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 huruf d, yang mana Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada akhir tahun anggaran.



- d. Penggalian gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Patoman hanya diwakilkan oleh beberapa masyarakat hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15 yang seharusnya penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi, berikut buktinya :

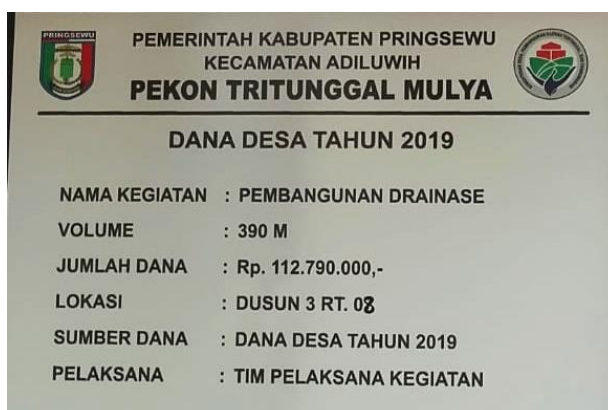


Wakil Peserta Musyawarah	
1.	KIKI SUBEHI
2.	SUTRASSANO
3.	KISDIANTO
4.	BERO
5.	NYOMAN P
6.	TOTOK T

**Gambar 3 : Daftar Peserta Musyawarah Desa Patoman Tahun 2019**

*Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Patoman Tahun 2019*

- e. Media informasi untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Patoman belum tersedia sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (2) yaitu media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Berikut merupakan contoh Desa di Kabupaten Pringsewu yang menyediakan papan informasi :



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU KECAMATAN ADILUWIH PEKON TRITUNGAL MULYA	
<b>DANA DESA TAHUN 2019</b>	
NAMA KEGIATAN	: PEMBANGUNAN DRAINASE
VOLUME	: 390 M
JUMLAH DANA	: Rp. 112.790.000,-
LOKASI	: DUSUN 3 RT. 08
SUMBER DANA	: DANA DESA TAHUN 2019
PELAKSANA	: TIM PELAKSANA KEGIATAN

**Gambar 4. Contoh Transparansi Penyerapan Belanja Bidang Pembangunan Fisik Desa Tritunggal Mulya**

*Sumber : Jejakkasus.info*

Data keuangan yang berhubungan dengan penyerapan belanja pada kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) atau rabat beton di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung dengan rincian panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 650 meter dengan perkiraan anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 401.957.500,- yang seharusnya disebarluaskan dan diinformasikan kepada masyarakat Desa Patoman adalah data tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Desa Patoman Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

**Tabel 1. APBDesa Desa Patoman Tahun Anggaran 2019**

Jenis	Anggaran (Rp)	Keterangan
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan Asli Pekon</b>		
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.361.574.000</b>	
<b>Dana Desa</b>	860.578.000	DD
<b>Alokasi Dana Pekon</b>	494.996.000	ADP
<b>Bantuan Keuangan.</b>	6.000.000	B.Prov
<b>Bantuan Propinsi</b>	6.000.000	
<b>BELANJA</b>	<b>1.361.574.000</b>	
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PEKON</b>	<b>465.912.000</b>	
<b>Penghasilan Tetap Dan Tunjangan</b>	373.496.180	ADP
<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	28.184.320	ADP
<b>Operasional BHP</b>	2.041.000	ADP
<b>Operasional Lembaga Kemasyarakatan</b>	2.878.500	ADP
<b>Penyelenggaraan Perencanaan Pekon</b>	1.866.000	ADP
<b>Pembangunan Sarana dan prasarana Kantor Pekon</b>	57.446.000	ADP+B.Priv
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>802.127.000</b>	
<b>Kegiatan Pembangunan Talud</b>	119.446.000	DD
<b>PEMBANGUNAN TALUD DUSUN IV</b>	76.399.000	DD
<b>PEMBANGUNAN TALUD DUSUN IV</b>	43.047.000	DD
<b>Kegiatan Pembangunan Rabat Beton</b>	401.957.500	DD
<b>PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN I</b>	205.909.500	DD
<b>PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN II</b>	67.416.000	DD
<b>PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN III</b>	128.632.000	DD
<b>Kegiatan Pembangunan Drainase</b>	140.344.500	DD
<b>DRAINASE DUSUN IV</b>	69.825.500	DD
<b>DRAINASE DUSUN I</b>	70.519.000	DD
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa</b>	53.430.000	DD
<b>Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Jalan</b>	10.106.500	DD
<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Baru</b>	58.142.500	DD
<b>Kegiatan Pengadaan Air Persawahan</b>	18.700.000	DD
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>35.084.000</b>	<b>ADP</b>
<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Lingkungan Pekon</b>	14.106.000	ADP
<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Pekon dan Perangkat</b>	20.978.000	ADP
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>58.451.000</b>	<b>DD</b>
<b>Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	15.605.000	DD
<b>Peningkatan Kapasitas Kelompok Bina Keluarga</b>	14.286.000	DD
<b>Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Kecil Menengah</b>	19.299.000	DD
<b>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Karang Taruna</b>	9.261.000	DD

Sumber : Data Keuangan APBDesa Desa Patoman Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa pendapatan Desa Patoman untuk tahun anggaran 2019 sebesar 1.361.574.000 yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, dan Bantuan keuangan pemerintah provinsi. Dalam rangka untuk menjalankan kewenangan desa, maka pemerintah Desa Patoman berkewajiban untuk membelanjakan pendapatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa telah menelan biaya sebesar 58,9 persen. Terkhusus untuk pembangunan rabat beton telah menghabiskan dana sebesar 29,5 persen dari total keseluruhan belanja desa.

**Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019**

Jenis	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				401.957.500,-
Pembangunan Rabat Beton Dusun I				<b>205.913.500,-</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				62.547.500,-
<b>Belanja Benda Pos dan Materai</b>				180.000,-
Materai 6000	25	Lembar	6.000,-	150.000,-
Materai 3000	10	Lembar	3.000,-	30.000,-
<b>Belanja Jasa Upah tenaga Kerja</b>				57.725.000,-
Tukang	179	HOK	100.000,-	17.900.000,-
Pekerja	531	HOK	75.000,-	39.825.000,-
<b>Belanja Sewa Pembelian Peralatan Kerja</b>				4.042.500,-
Cangkul	5	Buah	75.000,-	375.000,-
Selang water pas	25	Meter	4.000,-	100.000,-
Benang Nylon	16	Gulung	4.000,-	64.000,-
Ember kecil	25	Buah	12.500,-	312.500,-
Grobk sorong	4	Buah	625.000,-	2.500.000,-
Meteran besar	2	Buah	150.000,-	300.000,-
Meteran kecil	3	Buah	35.000,-	105.000,-
Selang air ½"	25	Meter	6.000,-	150.000,-
Baskom semen	8	Buah	17.000,-	136.000,-
<b>Belanja Honor Tim Pengadaan B&amp;J</b>				600.000,-
Ketua	1	Org/Keg	300.000,-	300.000,-
Sekretaris	1	Org/Keg	200.000,-	200.000,-
Bendahara	1	Org/Keg	100.000,-	100.000,-
<b>Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton</b>				143.366.000,-
Semen	794	Zak	64.000,-	50.816.000,-
Koral	160	M <sup>3</sup>	385.000,-	61.600.000,-
Pasir	90	M <sup>3</sup>	190.000,-	17.100.000,-
Papan begisting	5	M <sup>3</sup>	1.650.000,-	8.250.000,-
Pasir urug	35	M <sup>3</sup>	160.000,-	5.600.000,-
Pembangunan Rabat Beton Dusun II				<b>67.417.000,-</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				19.813.000,-
<b>Belanja Benda Pos dan Materai</b>				138.000,-
Materai 6000	18	Lembar	6.000,-	108.000,-
Materai 3000	10	Lembar	3.000,-	30.000,-
<b>Belanja Jasa Upah tenaga Kerja</b>				19.075.000,-
Tukang	61	HOK	100.000,-	6.100.000,-
Pekerja	173	HOK	75.000,-	12.975.000,-
<b>Belanja Honor Tim Pengadaan B&amp;J</b>				600.000,-
Ketua	1	Org/Keg	300.000,-	300.000,-
Sekretaris	1	Org/Keg	200.000,-	200.000,-
Bendahara	1	Org/Keg	100.000,-	100.000,-
<b>Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton</b>				47.604.000,-
Semen	246	Zak	64.000,-	15.744.000,-

**Lanjutan Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019**

Koral	51	M <sup>3</sup>	385.000,-	19.635.000,-
Pasir	30	M <sup>3</sup>	190.000,-	5.700.000,-
Papan begisting	2,50	M <sup>3</sup>	1.650.000,-	4.125.000,-
Pasir urug	15	M <sup>3</sup>	160.000,-	2.400.000,-
Pembangunan Rabat Beton Dusun III				128.627.000,-
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				38.857.000,-
<b>Belanja Benda Pos dan Materai</b>				132.000,-
Materai 6000	18	Lembar	6.000,-	108.000,-
Materai 3000	8	Lembar	3.000,-	24.000,-
<b>Belanja Jasa Upah tenaga Kerja</b>				38.125.000,-
Tukang	61	HOK	100.000,-	11.800.000,-
Pekerja	173	HOK	75.000,-	26.325.000,-
<b>Belanja Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa</b>				600.000,-
Ketua	1	Org/Keg	300.000,-	300.000,-
Sekretaris	1	Org/Keg	200.000,-	200.000,-
Bendahara	1	Org/Keg	100.000,-	100.000,-
<b>Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton</b>				89.770.000,-
Semen	510	Zak	64.000,-	32.640.000,-
Koral	98	M <sup>3</sup>	385.000,-	37.730.000,-
Pasir	55	M <sup>3</sup>	190.000,-	10.450.000,-
Papan begisting	3	M <sup>3</sup>	1.650.000,-	4.950.000,-
Pasir urug	25	M <sup>3</sup>	160.000,-	4.000.000,-

*Sumber : Data Keuangan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019*

Berdasarkan table 2 rencana anggaran belanja kegiatan pembangunan Pembetonan Jalan (Betonisasi) di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sudah diperinci secara mendetail dengan memperhatikan satuan volume, jumlah, dan keseluruhan anggaran yang akan digunakan. Adapun pembangunan betonisasi di dusun I menghabiskan dana sebesar 51,2 persen, di dusun II menghabiskan dana sebesar 16,7 persen dan dusun III sebesar 32,01 persen dari keseluruhan belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. Namun, data RAB tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat Desa Patoman.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Patoman belum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, khususnya dalam penyerapan belanja kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi). Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019, agar diperoleh suatu cara penyelesaian masalah dalam penyerapan belanja dengan memperhatikan dan mengedepankan asas transparansi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai, ialah:

Mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, dan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Keuangan Negara tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak terkait yang berhubungan dengan Penyerapan Belanja. Bagi pihak pemerintah Desa Patoman diharapkan kedepannya dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih transparan, sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Larasati, Endang. 2008. *Keuangan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Tim PUSDIKLAT Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkeu RI. 2014. *Modul Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, David. 2017. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

### JURNAL

- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2017. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparansi dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Penelitian*, 387- 410.
- Auditya, Lucy, Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3 (1) : 21-41.
- Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10 (2) : 95-102.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (5) : 1-20.

- Fuad, Adib N.. 2017. Peran Kepala Desa dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Bantengmati. *Observasi*, 1-15.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao - Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Baru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4 (2) : 193-201.
- Nurhayati. 2017. Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1 (2) : 36-54.
- Ramadhani, Rifka dan Mia Angelia Setiawan. 2019. Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1 (2) : 710-726.
- Rerung, Elypaz D, Herman Karamony dan Wiston Pontoh. 2015. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah : Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 192-202.
- Ritonga, Irwan T dan Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia : Berbasis Web. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2): 110-126.
- Suhaidar dan Izma Fahria. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Balunijuk Kabupaten Bangka. *Laporan Akhir Penelitian Dosen Tingkat Jurusan*, 1-31.
- Sukoco, Manik. 2003. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Penelitian*, 1-18.
- Wuisang, Ari. 2015. Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oleh Pemerintah. *Pakuan Law Review*, 1 (2) : 1-32.

## **SKRIPSI**

- Aprilianti, Gina. 2018. *Transparansi Anggaran Pemeliharaan Armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi Tahun 2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Damayanti, Irma. 2018. *Transparansi Penggunaan Dana Desa (Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016)*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Siringjaya.

- Fatmasary, Natalia D..2017. *Transparansi Anggaran Dana Bantuan Gubernur Di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2014*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siringjaya.
- Irvan, I Wayan. 2017. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Pratiwi, Endah. 2016. *Transparansi Penggunaan Dana Alokasi Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Zainadi, Elfin. 2010. *Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2009 - 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014. Jakarta: Kementerian Sekretarian Negara RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. 2014. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri RI.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan*. 2012. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. 2011. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.

## **INTERNET**

- PT. Asiacon Cipta Prima. 2019. Pengertian dan Fungsi Rabat Beton. *Artikel*, (online). (<https://asiacon.co.id/blog/pengertian-dan-fungsi-rabat-beton-adalah>, diakses 03 Februari 2020).



www.artikelsiana.com. 2014. Pengertian Tujuan Kebijakan Anggaran dan Jenisnya. *Artikel*, (online). (<https://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-tujuan-kebijakan-anggaran-jenisnya.html>, diakses 12 Februari 2020).

Radarnusantara. 2019. Pembangunan Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Artikel*, (online). (<https://www.radarnusantara.com/2019/04/pembangunan-pekon-patoman-kecamatan.html>, diakses 20 Juni 2020).

Jejakkasus.info. 2019. Pembangunan Drainase Pekon SumberBandung. *Artikel*, (online). (<https://jejakkasus.info/diduga-pembangunan-drainase-pekon-sumberbandung-sarat-korupsi/>, diakses 20 Juni 2020)

#### **LAIN LAIN**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.